



Buletin Parlementaria



Pemanfaatan Area Pinggir Sungai Perlu Penggunaan Teknologi yang Baik



9 Pemerintah
Harus Segera
Temukan Solusi
Harga Pangan
Stabil Jelang
Ramadan



16 Legislator
Minta Polemik
di Kemenkeu
Diselesaikan
Sesuai Prosedur

Nomor 1238/III/III/2023 • Maret 2023



9 772614 339005



Media
DPR RI

Pemanfaatan Area Pinggir Sungai Perlu Penggunaan Teknologi yang Baik



FOTO: NDIY/PDT

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw saat meninjau Dermaga 6 Desa Wisata Bojongkulur dan Pasar Bojongkulur, Gunung Putri, Bogor, Kamis (16/3/2023).

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw mendesak Pemerintah Kabupaten

Bogor, untuk memberikan apresiasi dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang berada di Desa Bojongkulur terutama kelengkapan fasilitas Desa Wisata Bojongkulur juga Pasar Bojongkulur. Hal ini penting mengingat inisiatif masyarakat dalam membangun desa lewat pemanfaatan area pinggir sungai tersebut sangatlah patut mendapatkan perhatian besar.

"Hal-hal ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, harusnya pemerintah daerah hadir untuk apresiasi juga kepada mereka, dan apa yang perlu ini tadi kita lihat tempat parkirnya belum ini, ini yang harus dihadiri oleh Pemerintah Daerah, jangan Pemda hanya tutup mata saja, cuma mau tarik pajak

dari masyarakat, ini hal-hal ini yang saya minta supaya Anggota DPRD yang punya dapil hadir disini untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat," katanya usai meninjau Dermaga 6 Desa Wisata Bojongkulur dan Pasar Bojongkulur, Gunung Putri, Bogor, Kamis (16/3).

Roberth juga mengapresiasi inisiatif BUMdes beserta perangkat Pejabat Kelurahan dan Kecamatan, juga masyarakat Bojongkulur yang telah bersinergi mengubah perspektif Desa Bojongkulur. Dari desa rawan bencana menjadi desa wisata yang memberdayakan ekonomi masyarakat dengan teknologi.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi menilai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bojongkulur patut menjadi role model pengembangan pembangunan desa. Sebab, masyarakat beserta perangkat desa di dalamnya telah berinisiatif

mengubah sebuah musibah (banjir) menjadi berkah. Yaitu, dengan memanfaatkan area pinggir sungai Cikeas menjadi desa wisata melalui pemanfaatan teknologi yang sangat baik.

"Kemampuan mengonversi potensi-potensi ini adalah suatu keberhasilan BUMDes Bojongkulur dan masyarakat sekitarnya," ujar Legislator Dapil Jabar V yang meliputi Kabupaten Bogor ini. Ia menyatakan bahwa untuk menyelesaikan persoalan banjir di Desa Bojongkulur adalah dengan memulai dari akar masalahnya. Mulai dari, harus ada studi *Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP)*, pembebasan tanah, dan normalisasi sungai. Di samping turut juga membangun tanggul-tanggul agar banjir tidak lagi meluap hingga ke pemukiman warga.

"Kita harus menyelesaikan di akar masalahnya, dalam hal ini kita sudah dapat informasi itu bahwa akan segera dilaksanakan studi LARAP. Yaitu, satu tahap di mana sebelum dilakukan pembebasan tanah dan normalisasi sungai untuk menampung aliran sungai supaya tidak meluap ke perumahan penduduk. Artinya, (jika) masalah studi LARAP sudah dilalui, saya kira masalahnya sudah selesai, di samping juga membangun tanggul-tanggul. Terpenting lagi saya kira masyarakat juga harus diedukasi terhadap hal-hal yang bisa merusak lingkungan, bahkan berpotensi banjir bukan saja disebabkan meluapnya air, tapi juga gaya hidup yang bersih tertib dan seterusnya," urai Mulyadi.

ndy/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya





Gelorakan Semangat Kesetaraan dan Inklusi di 'Women's Day Run'



Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar saat diwawancarai usai melepas peserta lomba lari Women's Day Run 10 K di halaman Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (12/3/2023).

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan peringatan International Women's Day atau Hari Perempuan Internasional merupakan wujud penghargaan serta apresiasi terhadap kaum perempuan. Hal itu disampaikan saat membuka ajang lari *Women's Day Run* yang bertajuk *Equality Today For a Harmony Tomorrow*.

"Kita harus terus memperjuangkan hak-hak perempuan tanpa memandang asal, etnis, bahasa, budaya dan ekonomi serta pandangan politik," ungkap Gus Muhaimin, sapaan akrabnya, sebelum melepas peserta lomba lari *Women's Day Run 10 K* di halaman Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (12/3).

Hari Perempuan Internasional, kata Gus Muhaimin, juga memiliki makna sebagai bagian dari perjuangan

mencapai perdamaian dan kesetaraan bagi perempuan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Lebih lanjut, Gus Muhaimin menyampaikan semangat perjuangan itu harus terus digelorakan bersama. Ia berharap, semangat merangkul kesetaraan dan inklusivitas semakin cerah di Indonesia, meski di tengah tantangan indeks kesetaraan gender yang masih rendah.

"Kita bersyukur, saat ini kesetaraan gender di Indonesia mengalami perbaikan. Hal tersebut terlihat dari skor Indeks Kesenjangan Gender Global Indonesia yang sebesar 0,697 poin pada 2022. Indeks tersebut naik 0,009 poin dari tahun sebelumnya. Kenaikan indeks tersebut menjadikan Indonesia naik ke peringkat 92 secara global," jelasnya. **ann/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindy, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Fadlun Bariyah, Prima Danutirta, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'adiyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullu, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimmbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonce Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldie Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoyowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Ria Damayanti

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Sukamta Minta Indonesia Konsisten pada Amanat UUD 1945

Belum lama ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, pemerintah memberikan jaminan keamanan kepada Timnas dari berbagai negara untuk mengikuti ajang Piala U-20, termasuk Israel. Sementara beberapa lembaga mendesak pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah menolak keikutsertaan Israel dalam perhelatan tersebut.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah semestinya konsisten berpegang kepada amanat Pembukaan UUD 1945, yang menolak segala bentuk penjajahan di dunia. Meski demikian, dirinya mengakui bahwa posisi Indonesia dihadapkan dengan pilihan yang sulit sebagai tuan rumah.

"Kalau menilik sejarah, saat penyelenggaraan Asian Games tahun 1962, Presiden Soekarno menolak kehadiran kontingen Israel. Soekarno beralasan Israel telah melakukan penjajahan kepada Palestina. Sikap tegas Soekarno ini menyebabkan Komite Olimpiade Internasional (*International Olympic Committee/IOC*) yang menarik diri sebagai pelindung Asian Games IV. Puncaknya Indonesia keluar dari IOC dan menyelenggarakan Ganefo (*Games of the New Emerging Forces*) di Jakarta, yang berjalan sukses dihadiri 48 negara," ungkap Sukamta dalam keterangan tertulis yang diterima **Parlementaria**, Senin (6/3).

Lebih lanjut, menurut Politisi Fraksi PKS ini, sikap Presiden Soekarno saat itu membawa Indonesia memiliki posisi politik yang kuat di lingkup internasional, dengan menjadi pemimpin negara-negara

non blok. Tentu, pemerintah Indonesia saat ini juga harus siap dengan konsekuensi politik atas sikap yang dipilih. Salah satu konsekuensi politik itu adalah dimungkinkan adanya pandangan Indonesia mempolitisasi ajang olahraga.

"Tentu kita setuju ajang olahraga dijauhkan dari tarik menarik politik, ajang olahraga menjadi wahana perdamaian dunia. Namun kenyataannya tidak jarang, organisasi olahraga dunia punya sikap standar ganda. Ini bisa terlihat saat ini, beberapa organisasi melarang atlet-atlet Rusia dalam berbagai *event* internasional, termasuk saat ini ada 30 negara yang menolak Rusia dalam ajang Olimpiade 2024 di Paris," terang Sukamta.

Oleh sebab itu, Legislator Dapil Yogyakarta ini berharap pemerintah Indonesia jangan ragu dalam bersikap. Jika selama ini Indonesia senantiasa konsisten dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, terbebas dari penjajahan

Israel. Semestinya pemerintah berani bersikap untuk menolak keikutsertaan Timnas Israel dalam ajang U-20 di Indonesia.

"Pemerintah bisa melakukan diplomasi, menggalang dukungan dari berbagai negara untuk menolak keikutsertaan Timnas Israel. Ada banyak negara yang menolak penjajahan Israel, tentu akan mendukung sikap Indonesia. Jika ini dilakukan tentu akan menjadi tekanan politik bagi Israel dan membuka lebih kuat upaya untuk memerdekakan Palestina," tutupnya. — **hal/rdn**

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta.



FOTO: DOK/AMAN



Abdul Kharis Harap RUU Penyiaran Selesai di Periode 2019-2024

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan mengenai

perkembangan proses revisi RUU Penyiaran yang dibahas di Komisi I. Diketahui, revisi RUU Penyiaran sudah dilakukan sejak tahun 2012 untuk mengubah UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Alasannya adalah karena UU Penyiaran yang eksis saat ini dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi saat ini.

"Komisi I sedang membahas RUU penyiaran. Revisi yang sudah kita proses sejak periode yang lalu (2014-2019) dan periode sebelumnya (2009-2014), belum juga berakhir dan belum juga selesai. Namun, di periode ini kita berencana mudah-mudahan bisa selesai," terang Abdul Kharis dalam rekaman video yang diputar saat diskusi Forum Legislasi di Media Center, Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/3).

Legislatif Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V itu menyebut proses revisi RUU Penyiaran saat ini sudah sampai ke persiapan akhir draf RUU Penyiaran. Setelah draf RUU yang disusun oleh komisi I itu selesai, maka akan disampaikan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Kemudian, lanjut Abdul Kharis, Baleg tentunya akan menyampaikan dalam sidang Paripurna. Adapun setelah Paripurna, revisi RUU Penyiaran tersebut nantinya akan dikirim ke pemerintah untuk dibahas bersama dengan pemerintah.

"Jadi, proses di Komisi I hampir selesai untuk draf RUU Penyiaran.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.



FOTO: RSB/PDI

Mudah-mudahan dalam masa sidang besok ini draf RUU penyiaran sudah akan selesai. Demikian sekedar gambaran tentang progres penyiaran," tutup Politisi Fraksi PKS ini.

Di kesempatan yang sama, Komisioner Komisi Penyiaran

”

JADI, PROSES DI KOMISI I HAMPIR SELESAI UNTUK DRAF RUU PENYIARAN. MUDAH-MUDAHAN DALAM MASA SIDANG BESOK INI DRAF RUU PENYIARAN SUDAH AKAN SELESAI. DEMIKIAN SEKEDAR GAMBARAN TENTANG PROGRES PENYIARAN.

Indonesia (KPI) Irsal Ambia, berharap bahwa RUU Penyiaran pada periode ini dapat dirumuskan kemudian bisa dibahas dan menghasilkan undang-undang penyiaran yang baru. Terlebih rencana revisi tersebut sudah berlangsung lama.

"Nah DPR, pemerintah itu merumuskan berbagai macam konsep dan kebijakannya sejak lebih dari 10 tahun lalu. Tetapi memang pada secara aktual terealisasi sudah masuk di DPR sudah dibahas bahkan sebagian saja yang sudah masuk ke Baleg tapi kemudian belum berlanjut lagi," ujarnya.

Selain itu ia berharap RUU tersebut dapat bersifat progresif, yakni dalam memahami dan merespon kondisi sosial, ekonomi dan politik di Indonesia. Sehingga, RUU Penyiaran baru bisa menjadi pilar kedaulatan bangsa, baik di dalam maupun di luar. **ftn,hal/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Saan Minta Tahapan Pemilu dan Proses Banding Berjalan Paralel



FOTO: TS/PDT

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa. Foto: Eot/Pdt

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap melaksanakan tahapan Pemilu 2024. Menurutnya, tahapan pemilu dan proses hukum banding atas putusan PN Jakarta Pusat harus dijalankan oleh KPU secara beriringan (paralel).

"Sambil nunggu banding, tentu kita harapkan KPU tetap melanjutkan dan menyiapkan tahapan-tahapan berikutnya. Jadi paralel. Proses hukum dijalani, tapi proses tahapan pemilu juga tetap berjalan," kata Saan dalam keterangan tertulisnya yang dikutip **Parlementaria**. Senin (13/3).

Politisi Fraksi Partai NasDem itu mengatakan, putusan PN

Jakpus masih belum inkrah. Dengan demikian, putusan yang memerintahkan KPU agar tak melanjutkan tahapan pemilu belum bisa dieksekusi.

”

KETIKA MASUK BANDING, PUTUSAN PN KAN BELUM INKRAH, BELUM PUNYA KEKUATAN HUKUM TETAP. SELAMA BELUM INKRAH, BELUM BISA DIEKSEKUSI PUTUSAN TERSEBUT, MAKA PROSES TAHAPAN PEMILU HARUS TETAP JALAN.

"Ketika masuk banding, putusan PN kan belum inkrah, belum punya kekuatan hukum tetap. Selama belum inkrah, belum bisa dieksekusi putusan tersebut, maka proses tahapan pemilu harus tetap jalan," tandasnya.

Lebih lanjut, Legislator Dapil Jawa Barat VII itu mendukung langkah KPU mengajukan banding atas putusan PN Jakarta Pusat yang memerintahkan tahapan Pemilu 2024 ditunda. Diketahui, KPU resmi mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak Jumat (10/3). "Kita mendukung langkah KPU untuk melakukan banding. KPU harus benar-benar menyiapkan diri dengan argumentasi dan data-data yang dibutuhkan," tutup Saan. **we/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Santoso Dorong Bongkar Penggelapan Pajak

Anggota Komisi III DPR RI Santoso mengungkapkan, APBN seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, APBN sering kali tidak tepat sasaran sehingga rakyat tidak tersentuh dan terabaikan negara. Bahkan akhir-akhir ini mulai terbongkar adanya kebocoran pajak di beberapa sektor, pajak digelapkan, negara dirugikan, kesejahteraan rakyat terabaikan.

"Kebocoran pajak yang digelapkan mungkin bisa mencapai 20% setiap tahunnya. Ini skandal yang bombastis dan patut dibongkar agar APBN kita dapat maksimal untuk kesejahteraan rakyat," ungkap Santoso dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/3).

Saat ini ramai harta para pejabat kementerian yang tidak sesuai dengan profil atau LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Menurutnya, perilaku

koruptif para pegawai pajak dan bea cukai yang telah terungkap menjadi pintu masuk aparat menelisik harta kekayaan mereka. "Penanganannya melalui *extra ordinary crime* karena

”

KEBOCORAN PAJAK YANG DIGELAPKAN MUNGKIN BISA MENCAPAI 20% SETIAP TAHUNNYA. INI SKANDAL YANG BOMBASTIS DAN PATUT DIBONGKAR AGAR APBN KITA DAPAT MAKSIMAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT.

jika dilakukan dengan tindak pidana biasa tidak akan terbongkar kotak pandora kasus ini," kata Santoso.

Lebih lanjut Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan, presiden Jokowi harus memperhatikan kasus yang merugikan keuangan negara yang besar itu. Menurutnya, para oknum pegawai pajak dan bea cukai serta pihak-pihak yang terlibat, termasuk perusahaan swasta sebagai wajib pajak harus diperiksa.

Santoso menegaskan, hukum harus ditegakkan, karena menurut Santoso, pencurian uang pajak sudah lama dibiarkan berlangsung. "Menkeu harus berani ikut membongkar kerusakan oknum bawahannya. Jika Menkeu tidak melakukannya maka tuntutan mundur kepada beliau yang digaungkan publik suatu hal yang mesti dia lakukan," tegasnya.

Berita yang beredar saat ini Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, disorot sebab sering memamerkan harta kekayaannya di media sosial, seperti mobil antik hingga pesawat Cessna. Ini dianggap tak wajar. Tak sebanding dengan laporan harta kekayaannya di KPK alias LHKPN.

Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo juga telah menjalani klarifikasi di KPK terkait harta kekayaannya Rp56 miliar yang dinilai tidak sesuai dengan profil. Ini bukan kali pertama KPK meminta keterangan Rafael Alun, ayah penganiaya Mario itu pernah diklarifikasi pada 2018 lalu. Kemudian, Vidya Piscarista, istri Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harja Saputra, juga menjadi pusat perhatian warganet dengan gaya hidup mewahnya. **ssb/aha**

Anggota Komisi III DPR RI Santoso.



FOTO: IKA/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



Sahroni Apresiasi Upaya Kejagung Mengawal Proyek Strategis Nasional



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

pembangunan nasional berjalan bersih, efektif, dan minim aksi korupsi," ujar Sahroni dalam keterangan tertulisnya yang dikutip **Parlementaria**. Selasa (7/3).

Ia menilai kinerja Kejagung tersebut patut mendapatkan apresiasi. Peran PPS Kejagung sangat sentral dalam memastikan kelancaran pembangunan proyek-proyek strategis nasional. "Ini yang kita mau, adanya upaya-upaya pencegahan guna meminimalisasi berbagai praktik penyimpangan," ujar Legislator Partai NasDem itu.

Pengawasan sektor pembangunan, katanya, merupakan bentuk keseriusan dan dukungan Kejagung untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Tim PPS harus jauh lebih giat dan fokus ke depannya. "Saat ini Indonesia sedang fokus di sektor pemerataan pembangunan. Tim PPS harus semakin jeli dan tajam untuk kawal semuanya, jangan sampai ada yang kecolongan di satu proyek pun," ujar Sahroni.

Menurutnya, proses pelaksanaan program-program pembangunan dibutuhkan pengawasan dan pengawasan yang optimal agar seluruh program tersebut bebas dari praktik korupsi. "Kita ingin pastikan semua proyek pembangunan berjalan lancar tanpa adanya permainan-permainan. Ini penting agar hasilnya dapat maksimal dan memberi manfaat bagi masyarakat," tutup wakil rakyat dari Dapil DKI Jakarta III itu.

we/aha

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengawal Proyek Strategis Nasional (PSN). Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejagung telah menyelesaikan PPS sebanyak 80 proyek senilai Rp28,88 triliun.

"Kinerja tim PPS Kejagung telah luar biasa mengawal puluhan proyek strategis nasional. Saya kira tim PPS Kejagung memiliki peran penting dalam memastikan proyek-proyek

”

KITA INGIN PASTIKAN SEMUA PROYEK PEMBANGUNAN BERJALAN LANCAR TANPA ADANYA PERMAINAN-PERMAINAN. INI PENTING AGAR HASILNYA DAPAT MAKSIMAL DAN MEMBERI MANFAAT BAGI MASYARAKAT.

Scan QR untuk berita selengkapnya



Pemerintah Harus Segera Temukan Solusi Harga Pangan Stabil Jelang Ramadan

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengingatkan pemerintah untuk segera menemukan solusi agar harga komoditas pangan bisa segera stabil. Pasalnya, kebutuhan pangan saat Bulan Ramadhan dan Lebaran cenderung mengalami peningkatan permintaan yang sangat tinggi.

"Sebentar lagi kita memasuki bulan puasa dan lebaran maka pemerintah harus segera membuat kebijakan harga pangan, sebab kenaikan harga pangan yang tidak terkendali pasti menyebabkan masyarakat akan sulit mengakses pangan," tutur Johan dalam rilis yang diterima tim **Parlementaria**, Jumat (10/3)

Menurut Johan, masyarakat yang berada pada strata ekonomi lemah seperti petani, nelayan, buruh dan yang berpenghasilan tidak menentu menjadi kelompok yang paling merasakan dampak kenaikan harga pangan. Karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi inflasi pangan terutama saat puasa dan lebaran nanti.

"Karena pemerintah harus sadar bahwa petani selain sebagai produsen juga sebagai konsumen. Jadi, inflasi pangan pasti menyebabkan kesejahteraan petani semakin terpuruk," tutur Johan.

Politisi Fraksi PKS ini mendorong pemerintah dapat memberikan jaminan ketersediaan pangan yang murah dan terjangkau bagi penduduk miskin dan rawan pangan di seluruh pelosok tanah air.



Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan.

FOTO: AFR/PDT

"Perlu upaya redistribusi pangan untuk kelompok miskin, pemerintah harus menjamin stok pangan yang lebih rasional saat puasa dan lebaran ini agar harga bisa stabil di pasaran," ucap Johan.

”

KARENA PEMERINTAH HARUS SADAR BAHWA PETANI SELAIN SEBAGAI PRODUSEN JUGA SEBAGAI KONSUMEN. JADI, INFLASI PANGAN PASTI MENYEBABKAN KESEJAHTERAAN PETANI SEMAKIN TERPURUK,

Legislatif Dapil NTB I itu mendesak agar pemerintah mengambil langkah konkret menstabilkan harga komoditas pangan menjelang puasa dan lebaran tahun ini. Sebab, beberapa tahun terakhir pemerintah telah gagal mengelola pangan yang murah dan terjangkau bagi rakyat.

"Menurut data dari PIHPS Nasional, saat ini terus terjadi kenaikan harga komoditas pangan di pasar tradisional seperti komoditi bawang putih, cabai merah, cabai rawit dan minyak goreng curah, maka pemerintah harus hadir agar daya beli masyarakat tidak semakin terpuruk akibat terus melonjaknya kebutuhan pokok saat puasa dan lebaran nanti," tutup Johan. hal/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya



Bakri Siap Perjuangkan Optimalisasi Anggaran Pembangunan Desa di Jambi

Anggota Komisi V DPR RI H. Bakri melaksanakan audiensi dengan segenap Kepala Desa (Kades), Ketua BPD, dan tokoh masyarakat dari Provinsi Jambi, tepatnya di Kecamatan Kumpeh. Pada audiensi tersebut, Bakri menerima berbagai keluhan, masukan, dan aspirasi terkait masalah anggaran dan pembangunan desa yang dialami oleh perangkat desa setempat.

"Hari ini saya kedatangan tamu istimewa ya, beberapa kepala desa termasuk juga BPD dan tokoh masyarakat dari Provinsi Jambi tepatnya itu di Kabupaten Muaro Jambi, lebih pertajam lagi di Kecamatan Kumpeh. Mereka datang sini menyampaikan berbagai macam keluhan kesah mereka baik itu masalah anggaran desa maupun masalah pembangunan di desa mereka," tutur Bakri Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/3).

Politisi Fraksi PAN itu mengaku mendorong para perangkat desa di Kecamatan Kumpeh untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung ke DPR RI karena dirinya melihat adanya keinginan kuat dari perangkat desa untuk memaksimalkan penyerapan anggaran desa.

"Saya melihat bahwa keinginan daripada Kepala Desa dan BPD ini sangat tinggi, dia tahu bahwa dengan anggaran dana desa itu



FOTO: JKA/PDT

Anggota Komisi V DPR RI H. Bakri usai menerima audiensi Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) yang digelar di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/3/2023).

sangat terbatas. Oleh sebab itu, saya selalu mendorong mereka untuk ke Senayan merebut anggaran pusat. Alhamdulillah mereka mengusulkan

”

SAYA MELIHAT BAHWA KEINGINAN DARIPADA KEPALA DESA DAN BPD INI SANGAT TINGGI, DIA TAHU BAHWA DENGAN ANGGARAN DANA DESA ITU SANGAT TERBATAS. OLEH SEBAB ITU, SAYA SELALU MENDORONG MEREKA UNTUK KE SENAYAN MEREBut ANGGARAN PUSAT.

berbagai macam baik itu dari BSPS atau bedah rumah, jalan, jembatan dan juga desa wisata, termasuk juga mengenai Bumdes. Nah ini kami sambut baik, mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh Kepala Desa seluruh Indonesia karena ini menjadi satu momen yang bagus," tandasnya.

Sebagai tindak lanjut, Bakri berkomitmen untuk mendistribusikan proposal dan aspirasi yang sudah disampaikan oleh FKKD tersebut ke Komisi atau Kementerian terkait agar dapat terakomodir dengan baik. "Yang jelas hari ini proposal mereka masuk ke saya akan saya pilah-pilah, akan saya lihat ini Komisi berapa, ada yang kalau Komisi V nanti infrastruktur, apakah ke (Kementerian) Perhubungan, apakah PU, apakah di Komisi Pendidikan, Kesehatan nanti distribusikan," ungkapnya [pun,gam/aha](#)



Rugikan BPSK, Legislator Nilai UU Perlindungan Konsumen Bermasalah

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Duriyanto menyampaikan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang merupakan UU No. 8 Tahun 1999 memiliki substansi yang bermasalah. Dampaknya, UU tersebut dapat berpotensi untuk menyulitkan lembaga perlindungan konsumen, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

"Masalah perlindungan konsumen, jadi saya lihat sistem hukumnya yang pertama itu substansi banyak bermasalah. Di beberapa pasal, (seperti) pasal 54 (dan) 56. (pasal) 54 itu kalau nggak salah ya, itu *final and binding* putusannya tetapi di (pasal) 56 dia bisa ngajuin kasasi sehingga menyulitkan BPSK," ujar Darmadi dalam Forum Legislasi yang bertema "Urgensi Revisi UU Perlindungan Konsumen" di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu berpendapat bahwa selain secara substansi bermasalah, UU Nomor 8 Tahun 1999 ini juga memiliki struktur hukum yang kurang efisien. Hal ini menyebabkan BPSK menjadi tidak bertaji dan banyak tak beroperasi di berbagai daerah di Indonesia akibat dari UU Pemerintah Daerah yang tidak relevan dengan UU Perlindungan Konsumen. Padahal, menurutnya, BPSK ini merupakan salah satu lembaga yang memiliki peranan penting dalam perlindungan konsumen.



FOTO: MRI/PDT

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Duriyanto dalam agenda Forum Legislasi yang diselenggarakan di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/03/23). Adapun Forum Legislasi tersebut bertema 'Urgensi Revisi UU Perlindungan Konsumen'.

"Masalah kedua adalah struktur hukumnya. (Pada) aparat penegak hukumnya coba lihat BPSK, kita riset asal muasal bahwa BPSK itu jadi *impoten* itu karena Undang-Undang Pemda. Undang-Undang Pemda Nomor 23 Tahun 2004, dulu di UU Nomor 8 Tahun 1999 itu semua penyelesaian konsumen ditaruh di kabupaten/kota. Di UU Pemda ditarik ke provinsi. Di provinsi karena kekurangan dana nggak ada yang ngurus akhirnya BPSK hampir di seluruh Indonesia tutup atau anggarannya turun," tutur Legislator Dapil DKI Jakarta III itu.

Darmadi menambahkan bahwa dirinya menemui ada Majelis Hakim di BPSK yang memiliki gelar doktor, tapi hanya mendapatkan gaji sebesar

Rp500.000. Hal ini menyebabkan banyak BPSK di Kabupaten/Kota yang tutup atau kosong. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya sudah mengunjungi BPSK di berbagai daerah dan semuanya mengeluhkan hal yang sama.

"Bayangkan Majelis Hakim di BPSK itu ada yang Doktor Pak gajinya 500.000, akibatnya apa? di hampir seluruh kabupaten/kota itu banyak nggak ada BPSK atau ada BPSK-nya kosong. Bapak/Ibu sekalian itu yang terjadi situasinya seperti itu, saya datang *tuh* BPSK di Pontianak di Medan saya datang di mana saya datang itu hampir mereka mengeluh semuanya," pungkasnya.

[gam.gal/rdn](https://www.gam.gal/rdn)

Scan QR untuk berita selengkapnya



Penanganan Kebakaran Depo Plumpang Harus Fokus pada Penyebabnya

Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari meminta penanganan kebakaran Depo Pertamina Plumpang tidak hanya pada aspek korban serta dampaknya saja. Melainkan pula juga harus dilakukan upaya investigasi untuk melihat penyebab utama terjadinya terbakarnya depo yang telah dibangun sejak dekade tahun 1970 an itu.

"Kita harus melihat kausalitasnya. Apa yang menjadi pemicu dari kebakaran Depo Plumpang tersebut yang saat ini masih diinvestigasi," ujar Legislatif Fraksi PKS dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (9/3).

Melihat peristiwa tersebut, Diah menilai pentingnya perbaikan keamanan yang berstandar lebih tinggi ke depannya. Baik dari aspek infrastruktur, kilang, maupun perpipaan yang menjalar jauh dari balongan sampai Plumpang.

"Objek vital nasional ini tidak teramankan dengan baik. Keamanan menyangkut faktor infrastruktur dan faktor lainnya. Karena tidak teramankan dengan baik tersebut, sehingga terjadi kebakaran yang berdampak sangat luas, baik itu musibah bagi Pertamina sebagai aset Negara. Maupun masyarakat terdampak di sekitar Depo, juga masyarakat luas," papar wakil rakyat Dapil Jabar II itu.

Oleh karenanya, menurut Diah, Pertamina harus mampu meningkatkan kembali



Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari saat menjadi pembicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (9/3/2023).

teknologinya, melakukan pembaharuan teknologi yang saat ini memang masih berjalan meski belum

seratus persen.

Diah juga mendesak Pertamina untuk serius melakukan peremajaan kilang dengan teknologi yang dimiliki oleh Pertamina. Pihaknya juga mendesak Pertamina, agar selalu fokus pada perbaikan dan peremajaan. Bukan hanya fokus pada bagi-bagi keuntungan.

"Saya mendesak agar Pertamina menggunakan keuntungannya untuk fokus pada perbaikan infrastruktur dan teknologi dibanding terlalu fokus bagi-bagi keuntungan," tutupnya sambil menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang ini. [ayurdn](https://www.ayurdn.com)

”

SAYA MENDESAK AGAR PERTAMINA MENGGUNAKAN KEUNTUNGANNYA UNTUK FOKUS PADA PERBAIKAN INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI DIBANDING TERLALU FOKUS BAGI-BAGI KEUNTUNGAN.

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Kasus Ibu Hamil di Subang Tunjukkan Sistem Pelayanan Kesehatan Belum Optimal

Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari menyoroti kasus ibu hamil asal Kabupaten Subang, Jabar, Kurnaesih (39), yang meninggal setelah ditolak RSUD Ciereng. Ia menilai, kejadian tersebut menunjukkan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia yang masih bermasalah.

"Tidak ada faskes apalagi rumah sakit yang menolak pasien dalam kondisi darurat. Keselamatan pasien adalah hal yang utama," kata Putih Sari kepada wartawan, Selasa (7/3). Politisi Partai Gerindra ini menyangkan alasan yang disampaikan RSUD Ciereng yang menyatakan kamar

penuh, karena setiap rumah sakit seharusnya mengutamakan prinsip kedaruratan pasien.

”

**TIDAK ADA FASKES
APALAGI RUMAH
SAKIT YANG MENOLAK
PASIEN DALAM
KONDISI DARURAT.
KESELAMATAN PASIEN
ADALAH HAL YANG
UTAMA.**

"Rumah sakit tidak boleh menolak pasien dalam kondisi kritis, karena mereka seharusnya menjalankan tata laksana pelayanan kedaruratan pasien dulu baru merujuk ke faskes lain," kata Putih. Ia meminta Kementerian Kesehatan segera mengevaluasi sistem rujukan di berbagai daerah.

"Kementerian Kesehatan harus berbenah terhadap Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE), yang infonya sudah beberapa tahun ini berjalan tapi kenapa kejadian pasien ditolak di rumah sakit masih banyak terjadi di daerah? Ini harus dievaluasi segera," tandas Putih. Ia juga mendorong Kemenkes memberikan sanksi terhadap RSUD atau daerah yang tidak menjalankan pelayanan kesehatan dengan baik.

Sebelumnya diberitakan, Ibu hamil bernama Kurniasih meninggal dunia setelah diduga ditolak RSUD Ciereng, Subang, saat membutuhkan penanganan medis pada Kamis, 16 Februari 2023. Diketahui Juju Junaedi, suami Kurnaesih, sempat membawa sang istri ke ruangan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Ciereng Subang.

Tetapi, kondisi Kurnaesih yang mengalami demam dan kejang-kejang mengharuskannya mendapatkan perawatan intensif sehingga harus dipindah ke ruangan PONEK (pelayanan gawat darurat bagi ibu melahirkan), namun, kata Juju, pihaknya mendapat penolakan. Juju kemudian berinisiatif membawa Kurnaesih ke Bandung untuk mencari rumah sakit lainnya, tapi Kurnaesih meninggal dunia dalam perjalanan.

ann/aha

Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari.

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



MCN/PDT

Netty Pertanyakan Komitmen BP2MI Berantas Sindikat Mafia

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher geram dengan banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang meninggal saat bekerja di Malaysia. Menurut data BP2MI, kata Netty, dalam rentang 2014-2022, sudah ada 704 orang PMI asal NTT yang pulang dari Malaysia dalam kondisi tak bernyawa.

"Angka ini sangat memprihatinkan, artinya setiap pekan ada satu sampai dua orang PMI asal NTT yang meninggal dari Malaysia," kata Netty dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Jumat (10/3).

Sebagian besar, PMI tersebut kata Netty adalah mereka yang pergi dengan jalur tidak resmi atau non prosedural yang diiming-imingi oleh sindikat mafia *trafficking*. "Banyaknya masyarakat yang pergi dengan jalur non prosedural ini membuktikan bahwa sindikat mafia penempatan PMI ilegal masih merajalela di negara kita. Sudah sejauh apa realisasi komitmen BP2MI dalam memberantas sindikat mafia tersebut?" tanya Netty.

Politisi dari Fraksi PKS ini meminta agar BP2MI dan instansi terkait mengevaluasi secara besar-besaran penanganan PMI, khususnya soal pencegahan penempatan

PMI ilegal. "Karena yang terlibat dalam penempatan PMI ilegal ini bukan hanya pihak swasta tapi juga oknum-oknum petugas untuk menciptakan jalur gerbang tol pemberangkatan PMI ilegal," katanya.

"Kalau pemerintah serius sebenarnya tidak sulit untuk membongkar sindikat mafia ini hingga ke akar-akarnya. Apalagi titik-titik pelabuhan yang selama ini jadi gerbang tol pemberangkatan PMI ilegal sudah jadi rahasia umum. Hanya saja persoalannya pemerintah benar-benar komitmen memberantas atau tidak?" pungkasnya. — ann/rdn

”

KALAU PEMERINTAH SERIUS SEBENARNYA TIDAK SULIT UNTUK MEMBONGKAR SINDIKAT MAFIA INI HINGGA KE AKAR-AKARNYA. APALAGI TITIK-TITIK PELABUHAN YANG SELAMA INI JADI GERBANG TOL PEMBERANGKATAN PMI ILEGAL SUDAH JADI RAHASIA UMUM. HANYA SAJA PERSOALANNYA PEMERINTAH BENAR-BENAR KOMITMEN MEMBERANTAS ATAU TIDAK?



FOTO: MCN/PDT

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher.

Scan QR untuk berita selengkapnya



Komisi X Pertanyakan Aturan Wajib Masuk Sekolah Pukul 5 Pagi di NTT

Komisi X DPR RI mempertanyakan kebijakan aturan wajib masuk sekolah pukul 5 pagi waktu setempat bagi para pelajar di NTT. Pasalnya, kebijakan yang dicanangkan oleh Gubernur NTT Viktor Laiskodat ini dinilai akan menghambat kesiapan proses pembelajaran bagi para pelajar maupun para pengajar. Oleh karena itu, Komisi X minta segenap elemen Pemerintah Provinsi NTT terkait untuk mengkaji ulang dengan mempertimbangan dengan matang kebijakan tersebut.

Demikian pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda kepada **Parlementaria** dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/3). Menurutnya, jika tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk membangun kedisiplinan, maka akan lebih baik kedisiplinan dibangun dengan menggunakan metode lain yang lebih efektif sekaligus humanis.

"Saya pada posisi tidak setuju.

Saya merasa masih butuh kajian yang matang menyangkut soal kebijakan ini. Misalnya, isunya kan soal ingin pendisiplinan, kan masih banyak hal selain harus mengubah jam masuk sekolah kan. Pendisiplinannya masih banyak yang lain, yang saya kira bisa tanpa harus memajukan jam sekolah," ungkap Politisi F-PKB itu.

Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudin menegaskan untuk mengevaluasi aturan wajib masuk sekolah pukul 5 pagi. Dirinya menyampaikan seharusnya sebelum menerapkan kebijakan tersebut, Gubernur NTT Viktor Laiskodat beserta elemen Pemerintah Provinsi NTT terkait melakukan uji coba dengan

melibatkan aspirasi pengajar, ahli kesehatan, psikolog, dan para pakar terkait lainnya.

"Jangan anak-anak dijadikan kelinci percobaan. Bandingkan dengan Singapura, misalnya, performa akademik dan kemampuan memperhatikan atau menyimak pelajaran di sekolah meningkat saat mulainya tidak terlalu pagi. Karena, anak-anak sudah cukup istirahat dan mendapat asupan makanan dengan sarapan pagi," ucap Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Sepakat, Wakil
Ketua Komisi X DPR

Ketua Komisi X DPR RI
Syaiful Huda.

FOTO: DEP/PTD



”

SAYA PADA POSISI TIDAK SETUJU. SAYA MERASA MASIH BUTUH KAJIAN YANG MATANG MENYANGKUT SOAL KEBIJAKAN INI. MISALNYA, ISUNYA KAN SOAL INGIN PENDISCIPLINAN, KAN MASIH BANYAK HAL SELAIN HARUS MENGUBAH JAM MASUK SEKOLAH KAN.

RI Dede Yusuf menambahkan agar Kemendikbudristek ikut terlibat untuk menyelesaikan polemik aturan masuk sekolah pukul 5 pagi di NTT. Dirinya tidak ingin setiap kebijakan terutama di bidang pendidikan dibuat mengandalkan perasaan saja.

"(Kebijakan) ini harus *by data*, jadi *nggak* bisa *by feeling* atau kira-kira atau mungkin pengalaman pribadi seseorang, ini harus *by data*. Itu sebabnya saya mengusulkan, dalam hal ini Kemendikbud segera turun tangan menanyakan kepada pihak pemerintah provinsi apa yang mau dicapai? Target apa yang mau dicapai?" imbuh Dede.

ts/rdn

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Legislator Minta Polemik di Kemenkeu Diselesaikan Sesuai Prosedur

Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus meminta agar polemik yang terjadi di internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku. Yaitu dengan cara diserahkan ke ranah hukum.

"Kalau, misalnya, ada pemberitaan tentang adanya peredaran uang yang sangat besar dan tidak jelas itu tentunya ada ranahnya sendiri, tentu ada ranah hukum," ujar Sihar saat ditemui Parlementaria setelah menghadiri Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).

Mengenai laporan PPATK terkait adanya transaksi janggal yang memunculkan angka dengan jumlah fantastis, Politisi PDI-P itu menerangkan perlu adanya bukti yang diperlukan untuk dianalisis lebih jauh. Karena itu, ia meminta semua pihak untuk percaya pada upaya dan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan.

"Ya ini (harus) ada pembuktian hukum, nanti ada proses-proses yang harus dilalui. Kita juga nggak bisa mengambil pandangan yang melampaui (tanpa) data yang kita miliki. Saya sendiri juga hanya mengikuti pemberitaan tanpa melihat ada suatu data untuk kita menganalisa untuk apa yang terjadi. Jadi untuk *fair*-nya kepada semua pihak kita harus percaya bagaimanapun juga pada sistem yang ada dalam hal ini dalam sistem Kementerian Keuangan," tegasnya.

Sihar kemudian mengatakan bahwa dari pemberitaan yang



FOTO: OJI/PDT

Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus saat ditemui Parlementaria setelah menghadiri Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

dilakukannya, Kemenkeu telah melakukan penyisiran dan pemilahan terhadap beberapa pihak dan akan mendalami permasalahan yang dinilai memiliki risiko tinggi. Hal tersebut menurutnya menandakan adanya

”

KALAU, MISALNYA, ADA PEMBERITAAN TENTANG ADANYA PEREDARAN UANG YANG SANGAT BESAR DAN TIDAK JELAS ITU TENTUNYA ADA RANAHNYA SENDIRI, TENTU ADA RANAH HUKUM.

standar operasional yang berjalan di instansi tersebut.

"Kalau *nggak* salah baca juga, sudah mulai dipilah-pilah mana yang berisiko rendah, sedang, tinggi. Yang tinggi, akan didalami lebih lanjut melalui proses-proses yang ada. Nah, itu kan salah satu bukti bahwa ada suatu SOP yang berjalan dan tentunya kita harus percaya kepada SOP tersebut," lanjut Legislator dapil Sumatera Utara II itu.

Dengan adanya keterbukaan informasi, publik juga dapat mengawasi jalannya proses yang dilakukan oleh Kemenkeu. Sihar juga memahami kekecewaan yang ada di masyarakat setelah munculnya berbagai kasus di permukaan yang melibatkan para pejabat di Kemenkeu. [uc/rdn](#)



Indonesia Miliki Pekerjaan Besar Kembangkan Wirausaha Saingi ASEAN

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk menumbuhkembangkan wirausaha, khususnya dalam bersaing dengan negara-negara ASEAN dan negara maju lainnya. Dikutip data yang dipaparkannya dari *Global Entrepreneurship Index*, bahwa negara maju memiliki jumlah wirausaha rata-rata 14 persen dari jumlah penduduknya. Sayangnya, jumlah wirausahawan Indonesia terendah di Asia Tenggara, yaitu hanya sebesar 3,1 persen.

"Artinya, Indonesia masih memiliki PR (pekerjaan rumah)



FOTO: IST/PDI

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati saat menjadi narasumber pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema 'Potensi Kemandirian Ekonomi Masyarakat Sebagai Kontribusi Peningkatan Ekonomi Nasional', di Jakarta Timur, Rabu (8/03/2023).

”

DARI LAPORAN UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM (UNDP) MENEMUKAN BAHWA USAHA YANG DIKELOLA PEREMPUAN LEBIH MAMPU BERTAHAN DARIPADA LAKI-LAKI SAAT PANDEMI LALU, 47 PERSEN WIRAUSAHA WANITA MENGGUNAKAN PENJUALAN ONLINE.

besar dalam menumbuh dan mengembangkan wirausahawan agar mampu bersaing di negara ASEAN dan bahkan negara maju," ucap Anis saat menjadi narasumber pada kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) bertema 'Potensi Kemandirian Ekonomi Masyarakat Sebagai Kontribusi Peningkatan Ekonomi Nasional', di Jakarta Timur, Rabu (8/3). Acara ini hasil kolaborasi antara Yayasan Shaliza Sinergi Indonesia kerja sama dengan Bank Indonesia.

Lebih jauh, Anis juga menyebutkan beberapa faktor

yang menyebabkan rendahnya angka wirausaha. Yakni, pola pikir masyarakat untuk lebih mencari pekerjaan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaku wirausaha, dan kendala mengakses modal. Ditambah, regulasi yang belum mampu mengatasi persoalan yang menghambat perkembangan dunia wirausaha.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini pun mendukung upaya untuk memasifkan program Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan bersama

Bank Indonesia dengan adanya pelatihan dan sosialisasi yang masif kepada para pelaku usaha. Karena itu, Politisi Fraksi PKS ini memandang perlu adanya dukungan kebijakan dari pemerintah yang berperan aktif maupun *stakeholder* terkait. Antara lain, perlu adanya basis tunggal UMKM dan data berbasis jenis kelamin, agar memudahkan pemerintah maupun swasta dalam menargetkan bantuan kepada wirausaha perempuan.

"Dari laporan *United Nations Development Program* (UNDP) menemukan bahwa usaha yang dikelola perempuan lebih mampu bertahan daripada laki-laki saat pandemi lalu, 47 persen wirausaha wanita menggunakan penjualan online. Ini baik untuk pertumbuhan ekonomi digital jika dikawal dengan baik," pungkas Legislator Dapil DKI Jakarta I tersebut. **uc/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Baleg DPR RI Mengesahkan Jadwal Rapat Masa Sidang IV 2022-2023

Rapat Badan Legislasi DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas telah mengesahkan jadwal acara rapat-rapat Badan Legislasi Masa Sidang IV mulai 14 Maret-13 April Tahun Sidang 2022-2023. Penyusunan jadwal acara rapat meliputi penyusunan RUU yang disiapkan oleh Baleg, harmonisasi RUU Usulan Komisi atau Anggota, dan pemantauan serta peninjauan UU.

Dalam jadwal acara rapat berdasarkan keputusan Rapat Pimpinan Baleg, Selasa, (14/3), di masa sidang ini Baleg akan melanjutkan rapat Panitia Kerja harmonisasi RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan (POM), Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah. Lalu, pada Kamis, 16 Maret yang akan datang rapat baleg dijadwalkan pengambilan keputusan hasil harmonisasi RUU tentang POM.

Adapun di penghujung Maret, rencananya Baleg akan melakukan kunjungan kerja dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari kunjungan tersebut, pada 27 Maret Baleg akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan agenda Mendengarkan pandangan dan masukan dari Ombudsman RI atas perubahan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Setelah itu, pada 29 Maret, dilanjutkan dengan presentasi awal

draf RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Di hari selanjutnya, Baleg akan mendengarkan masukan dan pandangan narasumber atas rencana perubahan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Di sela-sela rapat tentang RUU Ombudsman RI, Baleg juga menyempatkan mendengarkan penjelasan dari Pengusul Pimpinan Komisi II atas 27 RUU tentang Kabupaten dan Kota. Tak hanya itu Baleg juga melakukan rapat presentasi awal draf RUU tentang Statistik.

Di awal April, Baleg melanjutkan agenda pembahasan RUU tentang Statistik dengan mendengarkan masukan dan pandangan BPS atas rencana penyusunan RUU. Pada 4 April Baleg juga akan mendengarkan masukan dan pandangan

narasumber atas penyusunan RUU tentang Statistik. Agenda ini sebagai upaya serap aspirasi dari berbagai kalangan.

Masih di bulan April, Baleg juga membahas rencana pemantauan dan peninjauan pelaksanaan UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, lalu dilanjutkan dengan RDP mendengarkan pandangan dan masukan dari OJK atas pelaksanaan UU tentang Perasuransian. Adapun masa sidang ini rencananya akan ditutup pada Kamis 13 April 2023 dengan rapat paripurna dan dilanjutkan dengan reses sampai dengan 15 Mei 2023. **ann,ssb/aha**

Ketua Baleg DPR RI
Supratman Andi Agtas.



FOTO:DEP/PDT



BKSAP Promosikan Peran Parlemen dalam Pemberantasan Korupsi di Forum GOPAC

Delegasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI yang tergabung dalam Organisasi Parlemen Dunia Anti-Korupsi (GOPAC) aktif mempromosikan pentingnya peran dan keterlibatan parlemen dalam pemberantasan korupsi global pada rangkaian Dialog Parlemen tentang Konvensi Antikorupsi PBB/*Parliamentary Dialogue on UNCAC* dan *Annual General Meeting* yang berlangsung di Doha, Qatar, pada 8-9 Maret 2023.

Ketua BKSAP DPR RI yang juga merupakan Wakil Ketua jaringan antar parlemen global anti-korupsi GOPAC, Fadli Zon, dalam memimpin Dialog Parlemen tentang 20 tahun Konvensi Antikorupsi PBB (UNCAC), menekankan perlunya komitmen kuat parlemen dan pihak terkait untuk memastikan efektivitas implementasi konvensi tersebut.

"Parlemen harus berada di garis terdepan untuk memastikan implementasi penuh UNCAC di tiap negara. Karena efektivitas dan kesuksesan implementasi UNCAC bergantung pada situasi sosial politik dan sistem hukum yang berbeda, parlemen harus mampu mengadaptasi komitmen global ini agar sesuai dengan konteks nasional masing-masing negara, dan memastikan implementasinya di tingkat nasional untuk pemberantasan korupsi dan memenuhi kebutuhan rakyat secara substansial," tutur Fadli, Rabu (8/3).

Sebagai satu-satunya instrumen internasional yang mengikat secara



Ketua BKSAP DPR RI Dr. Fadli Zon saat memimpin Dialog Parlemen tentang 20 tahun Konvensi Antikorupsi PBB (UNCAC) di Doha, Qatar.

hukum tentang anti-korupsi, sejak diadopsi pada tahun 2003 dalam Sidang Umum PBB, UNCAC telah mencapai kepatuhan yang hampir universal dengan disetujui dan diterapkan oleh 189 negara di seluruh dunia. Termasuk juga Indonesia, yang telah menandatangani Konvensi tersebut pada 18 Desember 2003 di Merida, Meksiko, dan secara penuh meratifikasinya dalam UU No. 7 tahun 2006 pada 19 September 2006.

Pada dialog yang dipimpin Fadli Zon tersebut, para ahli dan anggota parlemen yang hadir sepakat bahwa peran parlemen tidak hanya dalam menerjemahkan komitmen global UNCAC dalam kerangka kebijakan

nasional melalui ratifikasi, tetapi juga dalam pengawasan terhadap implementasinya yang dilakukan oleh pemerintah.

Resolusi PBB 8/14 yang diadopsi pada *Conference of the State Parties (CoSP) UNCAC* sesi ke-8 tahun 2019 juga menegaskan bahwa parlemen dan anggota parlemen memiliki peran kunci dalam pemberantasan korupsi. "Kami mengharapkan kemitraan yang lebih kuat dan strategis antara parlemen dengan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, mitra internasional dan lembaga pembangunan untuk memperkuat peran dan kapasitas parlemen dalam bidang ini," lanjut Fadli. **sbb/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Puteri Komarudin Tekankan Perlindungan atas Kekerasan Siber terhadap Perempuan

Organisasi Parlemen Dunia atau *Inter-Parliamentary Union* (IPU) menyelenggarakan Sidang ke-146 di Manama, Bahrain, pada 11-15 Maret 2023. Sebagai delegasi DPR RI yang hadir pada forum ini, Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Puteri Komarudin ungkapkan upaya Indonesia untuk melindungi perempuan dari kejahatan dan kekerasan siber.

Puteri menyampaikan, perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan siber. Di Indonesia, satu dari sepuluh perempuan bahkan telah mengalami salah satu bentuk kekerasan siber sejak usia 15 tahun. Dari tahun 2020-2021, misalnya, Komnas Perempuan mencatat peningkatan jumlah aduan kekerasan siber hingga 83 persen.

"Angka ini bahkan belum termasuk kasus-kasus yang tidak dilaporkan maupun masuk proses peradilan.

”

PEREMPUAN SANGAT RENTAN MENJADI KORBAN KEKERASAN SIBER. DI INDONESIA, SATU DARI SEPULUH PEREMPUAN BAHKAN TELAH MENGALAMI SALAH SATU BENTUK KEKERASAN SIBER SEJAK USIA 15 TAHUN.

Artinya, jumlahnya bisa lebih besar lagi," ungkap Puteri.

Puteri mengingatkan kepada anggota parlemen negara sahabat bahwa legislator berperan penting untuk memastikan diadopsinya kerangka hukum yang komprehensif dan holistik, utuh atau tidak terpisahkan. Peraturan yang diterbitkan harus memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, yang dimulai dari upaya pencegahan, penanganan, hingga pemulihan bagi korban.

"Contohnya, di Indonesia kami sudah mengesahkan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengkriminalkan berbagai bentuk kekerasan siber sebagai kekerasan seksual yang disebut Kekerasan Seksual Berbasis Teknologi. Serta mengatur pula 'pasal jembatan' yang menghubungkan kekerasan seksual dalam UU lain, seperti KUHP, UU Pornografi, sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga, dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih luas bagi korban," tutur Puteri yang juga menjabat sebagai Anggota Biro Perempuan Parlemen IPU mewakili Grup Asia Pasifik.

Lebih lanjut, Politisi Partai Golkar ini juga jelaskan keistimewaan UU TPKS yang memberikan kewenangan bagi pemerintah pusat untuk menghapus atau memutus akses konten kekerasan seksual.

"Kita tahu kekerasan siber itu sifatnya mudah menyebar secara cepat melalui internet. Bahkan, dapat meninggalkan jejak digital yang dapat mengganggu proses pemulihan bagi korban. Sehingga,



FOTO: IST/PDT

Anggota BKSAP DPR RI Puteri Komarudin saat menghadiri Sidang ke-146 di Manama, Bahrain.

melalui kewenangan ini kita dapat menjaga kepentingan korban untuk menghentikan jejak digital tapi tetap menjaga akses untuk proses hukum. Karena itu, kita dorong segera parlemen sahabat untuk juga segera membentuk undang-undang terkait kekerasan siber terhadap perempuan dan segera evaluasi kerangka hukum masing-masing," tutup Puteri.

ann/aha

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Di IPU 146, Putu Supadma Sampaikan Kearifan Lokal Masyarakat Bali Jaga Kelestarian Alam

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma

Rudana mengungkapkan masyarakat Bali sangat menjunjung tinggi kearifan lokal. Dengan kearifan lokal itu pula, masyarakat Bali sangat menjunjung tinggi dan menjaga kelestarian alam terutama air.

Hal itu disampaikan Putu saat menjadi panelis pada diskusi *Parliamentary Leadership in Addressing Insecurity and Crises: Putting Gender Equality at The Center of Water Security, Climate Resilience and Peace Sustainability* yang berlangsung di sela-sela Sidang IPU 146 di Manama, Bahrain, Sabtu (11/3) waktu setempat.

Putu menerangkan masyarakat Bali sangat memegang erat filosofi hidup Tri Hita Karana. "Tri Hita Karana berasal dari bahasa Sanskerta yang terbentuk dari tiga kata. Tri artinya tiga, Hita artinya kesejahteraan atau kebahagiaan, dan Karana artinya sebab atau penyebab. Jadi, Tri Hita Karana berarti tiga penyebab kebahagiaan," terang Putu.

Masyarakat Bali, sambung Putu, memaknai Tri Hita Karana sebagai konsep yang mengajarkan manusia untuk hidup berdampingan. Tujuannya, ungkap Putu, adalah untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan, tidak hanya dengan sesama manusia, tetapi juga dengan Tuhan dan lingkungan.

Ketiga hubungan harmonis tersebut, jelas Putu, diyakini akan membawa kebahagiaan,



FOTO: IST/PDT

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana saat menjadi panelis pada diskusi Sidang IPU 146 di Manama, Bahrain, (11/3/2023).

keharmonisan, dan kemakmuran dalam hidup. "Orang Bali menjunjung tinggi filosofi ini dalam hidup. Itu sebabnya kebijakan pemerintah di Bali juga dirancang sesuai dengan filosofi tersebut," tutur Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut, Legislatur Dapil Bali tersebut menegaskan, masyarakat Bali mengelola air dengan konsep Tirta atau Air Suci. Artinya, mata air alami merupakan kawasan suci yang harus dilindungi. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama untuk menjaga dan melestarikan Tirta ini.

"Tirta atau air suci merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat Bali. Yang dimaksud

dengan air suci adalah air yang diambil dari sumber air kemudian diupacarai, selanjutnya disebut Tirta. Air merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat Bali," papar Putu.

Putu meyakini, ketahanan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya air dan perlindungan iklim akan diperkuat dengan pelibatan dan pemberdayaan perempuan. "Untuk tujuan ini, saya juga mendorong parlemen untuk terlibat dengan kelompok perempuan dan organisasi masyarakat sipil yang berada di garis depan pekerjaan ini sebagai sekutu penting dalam menerapkan kebijakan tanggap gender," tutup Putu.

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



DPR RI Raih Penghargaan Terpopuler Media Cetak dan Online oleh PR Indonesia Award 2023

DPR RI menerima penghargaan Public Relation Indonesia Award (PRIA) 2023 kategori lembaga 'Terpopuler di Media Cetak dan Online 2022'.

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Indra Pahlevi yang mewakili DPR RI menerima penghargaan tersebut, mengatakan bahwa penghargaan ini menjadi semangat pendorong bagi Setjen DPR RI khususnya Biro Pemberitaan Parlemen sebagai *support system* kegiatan kedewanan.

"Ini tentu menjadi semangat pendorong bagi kita semua untuk tentu bisa lebih baik lagi dari hari ini agar tugas Biro Pemberitaan dalam rangka menyampaikan kinerja DPR RI kepada masyarakat itu semakin berdampak, semakin dirasakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tahu bahwa DPR itu melakukan kerja-kerja yang luar biasa," kata Indra kepada **Parlementaria**, usai menerima penghargaan di Bali, Jumat (17/3).

Lebih lanjut, Indra menambahkan bahwa penghargaan tersebut merupakan salah satu perwujudan dari Parlemen Modern yang sedang digaungkan DPR RI. "Setelah sebelumnya kita mendapat penghargaan pada ajang Indonesia Award untuk *Digital Transformation*, lalu kita mendapat penghargaan pada *Government Social Media Summit* untuk *Most Active* di Media Sosial. Dan hari ini alhamdulillah kita mendapatkan penghargaan terpopuler Media Cetak dan Media Online pada PR Award 2023 berdasarkan eksposur positif. Artinya ini merupakan bagian yang tak



Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi menerima penghargaan di Bali, Jumat (17/03/2023).

”

INI TENTU MENJADI SEMANGAT PENDORONG BAGI KITA SEMUA UNTUK TENTU BISA LEBIH BAIK LAGI DARI HARI INI AGAR TUGAS BIRO PEMBERITAAN DALAM RANGKA MENYAMPAIKAN KINERJA DPR RI KEPADA MASYARAKAT ITU SEMAKIN BERDAMPAK, SEMAKIN DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT, SEHINGGA MASYARAKAT TAHU BAHWA DPR ITU MELAKUKAN KERJA-KERJA YANG LUAR BIASA,

terpisahkan dalam rangka semua indikator Parlemen Modern itu diterapkan di DPR RI," lanjutnya.

Sebagai informasi, kategori Terpopuler di Media Cetak dan Online 2022 merupakan kategori penghargaan berbasis *non entry* (media monitoring). Penilaian terhadap kategori tersebut adalah berdasarkan jumlah eksposur positif tertinggi di media cetak dan online.

Khusus kategori ini, PR Indonesia bekerja sama dengan Indonesia Indicator melakukan monitoring pemberitaan ratusan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD di media cetak dan online lokal, sepanjang 1 Januari-31 Desember 2022. Monitoring menggunakan metode kuantitatif secara *real time* dan analisa kualitatif yang Indonesia Indicator dan PR INDONESIA lakukan. **bia/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Peringati Hari Perempuan Internasional, KORPRI Setjen DPR Gelar Pelatihan Budidaya Jamur

Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar Pelatihan Budidaya Jamur dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional. Ketua Korpri Setjen DPR RI Djaka Dwi Winarko mengungkapkan pelatihan ini diselenggarakan untuk membuka wawasan dan potensi para perempuan beserta seluruh para Anggota Korpri di Setjen DPR RI.

"Saya kira ini bagus nanti mungkin dari anggota Korpri maupun keluarganya bisa memanfaatkan waktu dan juga peluang-peluang usaha ini yang tentunya bisa menambah *income* dan juga bisa juga untuk konsumsi sendiri," ujar Djaka kepada Parlemen usai membuka Pelatihan Budidaya Jamur di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (10/3).

Selain membuka wawasan dan potensi, Djaka menjelaskan, budidaya jamur juga memiliki manfaat yang signifikan untuk kesehatan. Tidak hanya itu, kegiatan budidaya jamur ini dapat dilakukan dengan mudah oleh para pegawai karena bisa diterapkan secara mandiri dalam skala rumah. Ia pun menyebutkan, jika berhasil, budidaya jamur dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar, khususnya yang mayoritas adalah ibu rumah tangga.

Oleh karena itu, dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional, dirinya berharap para perempuan Indonesia, khususnya di Setjen DPR RI, bisa mengambil peran



FOTO: ENO/PDT

Ketua Korpri Setjen DPR RI Djaka Dwi Winarko (kanan) usai membuka Pelatihan Budidaya Jamur di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (10/3/2023).

yang lebih besar dengan mengambil posisi yang lebih strategis di masa mendatang.

”

SAYA KIRA INI BAGUS NANTI MUNGKIN DARI ANGGOTA KORPRI MAUPUN KELUARGANYA BISA MEMANFAATKAN WAKTU DAN JUGA PELUANG-PELUANG USAHA INI YANG TENTUNYA BISA MENAMBAH *INCOME* DAN JUGA BISA JUGA UNTUK KONSUMSI SENDIRI.

"Dilihat dari sisi kebijakan tidak ada kendala dan tidak ada rintangan karena sekarang terbuka lebar bagi siapa saja yang bisa berprestasi dan berkinerja untuk organisasi Sekjen DPR dan untuk lembaga DPR. Saya kira ini peluang untuk perempuan-perempuan yang berkarya di Sekretariat Jenderal untuk bisa lebih maju lagi," pungkas Djaka.

Senada, Sekretaris KORPRI Setjen DPR RI Furcony Putri Syakura menekankan adanya Pelatihan Budidaya Jamur ini akan membantu para Anggota Korpri di Setjen DPR RI menjadi individu yang produktif, terutama bagi para calon yang akan memasuki masa purna bakti nanti. Pasalnya, pelatihan ini menjadi ruang untuk mengasah diri melalui keahlian wirausaha.

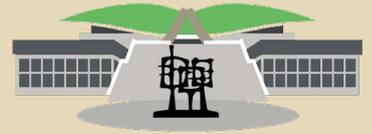
[ftn,lsn,ts/rdn](https://www.ftn.lsn.ts/rdn)

Scan QR untuk berita selengkapnya





LENSA PARLEMEN



Pt Deputi Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini mewakili DPR RI saat menerima penghargaan dari Perpustakaan Nasional atas prestasinya menjadikan Perpustakaan DPR RI sebagai Rujukan Nasional Akreditasi Perpustakaan di Jakarta, Senin (6/3/2023). FOTO: JKA/PDT



Rapat Koordinasi Pelayanan Keprotokolan di Bandara, di Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (9/3/2023). FOTO: EKI/PDT



Workshop Agenda Setting Biro Pemberitaan Parlemen yang diselenggarakan di Bekasi, Jawa Barat, Senin (13/3/2023). FOTO: PDT

